

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto, Wicaksono Bambang, Tamtari Wini, Kusumasari Bevaola, Nuh Muhammad, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta.
- , Latief Syahbudin M, Hadna Heruanto Agus, Arfani Noer Riza, 2003, *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Galang Printika, Yogyakarta.
- , 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Hestu, Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Fauzan, Muhamad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah (kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah)*, UII Press, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti, Achmad Yuliato, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah : Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang.
- Harbani, Pasalong, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Hartini Sri, Kadarsih Setiajeng, Sudrajat Tedi, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hayati, Tri, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Hadjon, H.Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- HS, Salim, H, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.

- , 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Sinargrafika Persada, Jakarta
- Isjawara, F, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung.
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jeddawi, Murtir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan,Kelembagaan,Manajemen Kepegawaian, Dan Peraturan Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Kaho, R. Josef,1995, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1996, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, sketsa pada masa transisi*, Kerjasama MAP UGM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Manan,Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , Magnar, H.Kuntana, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
- Mawardi, Oentarto. S, 2002, *Perumusan Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Prosiding Seminar Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*, UAD Press, Yogyakarta.
- Moleong, J.Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Rasul, Sjahrudin, 2003, *Pengukuran Kinerja Pemerinah Daerah : Konsep Dan Prinsip, dalam Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah*, UAD Press, Yogyakarta.
- Syaukani,H, 2012, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sirajuddin, Ibrahim Anis, Hadiyantina Shinta, Haruni Wido Catur, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, 2015, *Legislative Drafting*, Setara Press, Malang.
- Sugono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharyani, Setiawan R.Rake, Nasif Safar, Rokhman Fatur, 2002, *Model Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemda yang Berorientasi pada Pembaharuan Sektor Publik, Prosiding Seminar Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*, UAD Press, Yogyakarta.
- Sunindhia, Y.W, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Supriatna Tjahya, 1992, *Sistim Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supeno Hadi, 2009, *Korupsi di Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Suwardjono, Maria.S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Pedoman Dasar*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 2017, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soedarmayanti, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Soemitro, Ronny.H, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja Edisi 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja.HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (dalam rangka sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. JURNAL DAN MAKALAH

- Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah, Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Desember, 2015

Mawardi, Oentarto Sindung, *Perumusan Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Prosiding Seminar Nasional "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah"*, UAD Press, Yogyakarta, 2002.

Dwiyanto, Agus, "Pemerintah yang efisien, tanggap, dan akuntabel", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 1997

Suryanto, "Urusan Pemerintahan Daerah, Kemungkinan Problematika Implementasi UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Desentralisasi*, Volume 13, Nomor 2, 2015

Wasistiono, Sadu, " Menuju Desentralisasi Berkesimbangan", *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, Tahun 2010

C. **SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

Desyalika Nabilla, " *Dinamika Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016

D. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2831).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016 Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E. INTERNET

<http://www.kemendagri.go.id/news/2012/04/03/keterangan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-pemerintahan-daerah>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018

<http://dkk.lan.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Isu-isu-Strategis-Bidang-Desentralisasi-dan-Otonomi-Daerah-2016.pdf>, diakses tanggal 30 Januari 2018

https://www.minerba.esdm.go.id/publikasi/Paparan_Dirjen_Coffee_Morning.pdf, diakses pada tanggal 30 Januari 2018

<https://apkasi.org/dokumen/ryaas-rasyid-uu-no-232014-membelokkan-arrah-otonomi-daerah-dari-pakem-reformasi-1999/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018

<http://kupang.tribunnews.com/2009/08/05/tambang-emas-batu-gosok-geram-desak-bupati-cabut-izin-kp>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018

<http://www.floresa.co/2015/01/09/pt-mm-ilegal-konspirasi-dengan-pemkab-matim-harus-dibongkar/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018

<http://www.floresa.co/2015/01/15/tambang-dan-pertobatan-ekologis/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018

<https://walhintt.wordpress.com/2011/12/08/pernyataan-tolak-tambang-di-ntt-2/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2018